BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1 Pengaturan sanksi pidana mati di dalam UU PTPK tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) nya yang merumuskan “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Dari rumusan pasal ini terlihat bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Di samping ketentuan Pasal 2 UU PTPK, ancaman sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dapat pula dikenakan terhadap tindak pidana atas ketentuan yang terdapat di Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK.

5.1.2 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi negara hukum adalah adanya perlindungan HAM, termasuk pula hak untuk hidup. Hak untuk hidup diatur di dalam Pasal 28

A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan ditematkannya pasal ini sebagai pasal penutup berarti telah memberi tafsir bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM, khususnya hak hidup dapat ditegakkan.

5.2. Saran

5.2.1 Ruang yuridis untuk menerapkan sanksi pidana mati untuk koruptor sebenarnya sudah cukup lama disediakan yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Namun sayangnya, sepanjang sejarah perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi, belum ada satu pun kasus korupsi yang dituntut dengan sanksi pidana mati. Jika terdapat kasus korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) UU PTPK maka tidak perlu ada keraguan lagi untuk menerapkannya. Dibutuhkan sikap tegas dalam menerapkan aturan ini, khususnya untuk jaksa penuntut umum yang mempunyai otoritas untuk mendakwakan dan menuntut koruptor dengan pasal ini dan untuk hakim yang mempunyai otoritas untuk memutuskan perkara tindak pidana korupsi tersebut. Perlu ditekankan adanya suatu

komitmen yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya.

5.2.2 Selama peradaban manusia kajian akan hak hidup seolah tak pernah usang untuk diperdebatkan. Namun perdebatan tersebut janganlah menjadi penghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Konstitusi Indonesia tidak menganut prinsip kemutlakan HAM, hal ini juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan 3 / PUU – V / 2007. Perdebatan tersebut janganlah sampai mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jika pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan memang dirasa pantas oleh hakim untuk dijatuhinya sanksi pidana mati, maka sudah selayaknya hakim menjatuhkan sanksi pidana tersebut tanpa kompromi karena sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi telah diatur oleh undang-undang dan sama sekali tidak bertentangan dengan HAM. Demikian juga argumentasi yang disampaikan oleh para pihak yang menentang penjatuhan sanksi pidana mati telah dapat dimentahkan. Sehingga aparat penegak hukum tidak perlu takut untuk menggunakan pasal ini, justru dengan menggunakan pasal ini akan menciptakan sebuah terobosan hukum yang akan membuat orang akan melakukan perbuatan korupsi akan mengurungkan niatnya tersebut.